

Tahapan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sumatera Utara

Thirza Eunike Silaban¹, Fajar Utama Ritonga²

^{1,2}Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹*thirza@students.usu.ac.id, ²fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Kemiskinan pada negara Indonesia mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih belum mencapai kesejahteraannya, salah satunya dalam pemenuhan rumah layak huni. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan rumah layak huni, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kualitas rumah warga menjadi layak huni. Untuk menerima program ini, ada beberapa tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan, mulai dari identifikasi calon penerima bantuan hingga laporan pemantauan dan evaluasi. Dalam pendekatan dengan masyarakat calon penerima bantuan, dilakukan metode *community organization and community development* yakni dengan memberdayakan masyarakat dengan pendekatan langsung sebagai pendekatan teknik pekerjaan sosial yang dapat dilakukan untuk ditujukan kepada komunitas atau kelompok penerima bantuan Program yang bersifat makro. Beberapa tahapan intervensi yakni tahapan assesment, perencanaan program, intervensi, evaluasi dan diakhiri tahap terminasi. Adapun fokus dari penyelesaian masalah adalah dengan memberdayakan kelompok penerima bantuan agar mampu berdaya dan mandiri dalam mengikuti pelaksanaan program BSPS dari awal hingga akhir program. Tujuan dari pemberdayaan inipun dinilai berhasil dengan semakin antusiasnya masyarakat kelompok penerima bantuan dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program BSPS dan mengikuti berbagai tahapan koordinasi serta sosialisasi program BSPS.

Kata Kunci: Tahapan, Program, BSPS, COCD, Kesejahteraan.

Abstract

Poverty in Indonesia has resulted in many people who still have not achieved their welfare, one of which is in the fulfillment of habitable houses. In order to achieve community welfare through the fulfillment of habitable houses, the government through the Ministry of Public Works and Public Housing held a Self-Help Housing stimulant Assistance program for low-income communities, so as to improve the quality of people's homes to be habitable. To receive this program, there are several stages of implementation that need to be done, ranging from identification of potential beneficiaries to monitoring and evaluation reports. In the approach to the community of prospective beneficiaries, the method of community organization and community development is carried out by empowering the community with a direct approach as an approach to social work techniques that can be done to address the community or group of beneficiaries of macro programs. Several stages of intervention are Assessment, program Planning, Intervention, evaluation and termination stages. The focus of solving the problem is to empower the recipient group to be able to be empowered and independent in following the implementation of the BSPS program from the beginning to the end of the program. The purpose of this empowerment is also considered successful with the increasing enthusiasm of the recipient group community in completing the accountability for the implementation of the BSPS program and following the various stages of coordination and socialization of the BSPS program.

Keywords: Stages, Programs, BSPS, COCD, Welfare.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan kondisi individu, keluarga, atau kelompok dalam keadaan yang makmur baik secara sosial, ekonomi, mental dan spritualnya. Kesejahteraan pada suatu masyarakat pada hakekatnya dapat tercapai apabila peningkatan kualitas hidup mulai dari kebutuhan dasar seperti peningkatan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kesehatan dapat terwujud. Namun, dalam mencapai kondisi tersebut tidak selalu mudah terutama bagi masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu pesat diiringi dengan angka kemiskinan yang tinggi menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan kemiskinan yang begitu krusial masih banyak ditemui dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Menurut Kuncoro (1997: 102-103) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kualitas hidup yang layak. Dalam Udiati & Murtiwiidayanti, 2017, terdapat lima permasalahan kesejahteraan sosial yang tersebar di Indonesia, yakni keluarga fakir miskin, keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan penyandang cacat. Spicker dalam membahas kebijakan mengemukakan ada lima aspek yang harus diperhatikan yang dikenal dengan *“bid five”* yaitu : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial dimana kelima aspek tersebut Salah satu permasalahan pemenuhan kualitas hidup yang dihadapi masyarakat adalah masih tidak terpenuhinya rumah layak huni yang mampu memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan (Sugihartono, 2018). Rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya terpenuhi agar mampu mencapai kesejahteraannya. Rumah atau hunian berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya baik masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan (Malkanov, 2021). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal ini, maka negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warganya salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga negaranya. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kebutuhan dasar dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam rangka pengadaan rumah layak huni, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum telah dijalankan sejak tahun 2006 dengan jumlah penerima bantuan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun di wilayah Sumatera Utara, pelaksanaan pembangunan atau penyediaan perumahan dilakukan dibawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera II, yang terletak di Jalan Suluh No. 99, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II (BP2P Sumatera II) juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya yang dalam hal ini yakni pelaksanaan program Bantuan Stiumlan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sebagai bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah/ kampus dengan program penguasaan keahlian, mahasiswa/i melakukan suatu praktek kerja lapangan. Bersamaan dengan diadakannya Program Kampus Merdeka yang dapat diikuti oleh mahasiswa semester 5 hingga 7, kegiatan Magang Studi Independen Bersertifikat, mahasiswa/i mendapatkan konversi SKS sebanyak maksimal 20 SKS. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa/i dapat menambah pengalaman, mengembangkan cara berpikir, menambah ide dan inovasi, mampu berhadapan langsung dengan masyarakat dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, sikap profesional serta disiplin. Kegiatan ini dilakukan oleh Thirza Eunike Silaban (210902067) mahasiswi Universitas Sumatera Utara,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, di Balai P2P Sumatera II BSPS yang dibimbing oleh supervisor serta mentor program kampus merdeka, Bapak Mardianto.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 14 Juni 2024. Pada awal kegiatan, mahasiswi melakukan pembekalan bersama dengan peserta kegiatan lainnya yang berasal dari luar daerah, serta melakukan pengenalan dengan pegawai yang ada di Balai P2P Sumatera II. Di awal kegiatan, mitra menjelaskan deskripsi tentang pekerjaan ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa/i. Adapun secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya akan berhadapan dengan masyarakat, namun masih disesuaikan kembali dengan kebutuhan mitra dan juga agenda kerja dari mitra. Mitra juga memberikan pembekalan berupa materi mengenai BSPS, tentang pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan oleh mahasiswa/i bersama mitra pada bulan pertama hingga bulan ketiga yakni melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan penerimaan bantuan bagi Calon Penerima Bantuan ataupun yang sudah mendapat bantuan. Pada pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa/i difokuskan untuk memahami tahapan pelaksanaan pemberian bantuan program BSPS kepada masyarakat. Untuk itu, mahasiswa kemudian melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen berupa proposal, Laporan Penggunaan Dana I dan II dan kemudian mendiskusikan berbagai kesalahan dokumen yang ditemukan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengantarkan proposal calon penerima bantuan. Adapun pada bulan keempat, mahasiswa/i sudah mulai mengikuti kegiatan di lapangan yakni melakukan koordinasi terkait program BSPS dengan perangkat desa di Kabupaten Langkat, Sosialisasi Verifikasi Proposal calon penerima bantuan di desa Durian Lingga, Kabupaten Langkat.

Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan program BSPS sehingga mampu tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar benar membutuhkan. Sebagai suatu program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka program BSPS dilaksanakan dengan prosedur dan panduan teknis yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022. Berdasarkan hal ini, maka pelaksanaan program BSPS juga melalui berbagai tahapan yang perlu diperhatikan sehingga seorang calon penerima bantuan mampu dan dapat menerima bantuan apabila sudah sesuai dengan tahapan teknis yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mahasiswa/i bersama dengan mitra dibekali suatu kemampuan untuk mampu menganalisis dan menentukan proposal calon penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria sehingga layak atau tidak layak memperoleh program BSPS.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di lapangan melalui magang ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan mini project dengan metode-metode pada pekerjaan sosial yakni *casework*, *group work*, dan *community organization community development* (COCD). COCD merupakan metode pekerjaan sosial yang leaukan intervensi pada tingkat komunitas (Alghivari, dkk. 2022). Dalam *Social Work Dictionary*, pengorganisasi masyarakat (CO) merupakan suatu proses intervensi yang dilakukan pekerja sosial dalam rangka menolong individu, kelompok, dan atau masyarakat. Pada pelaksanaannya, mahasiswa menggunakan metode COCD untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang di alami klien. Adapun dalam kegiatan ini, mahasiswi berada pada posisi sebagai Fasilitator Pendamping Pemberdayaan BSPS, sehingga mahasiswa melakukan *project* yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yakni kelompok penerima bantuan BSPS. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok penerima bantuan dan atau kelompok calon penerima bantuan. Adapun model intervensi yang dilakukan yakni pendekatan secara direktif yang berlandaskan pada asumsi bahwa *community worker* mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini peranan pemberdaya lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*.

Dalam membantu komunitas penerima bantuan dan calon penerima bantuan, mahasiswa dan mitra yakni *Superteam* BSPS menggunakan metode COCD melalui tahapan umum (general) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Assesment

Tahap ini dilakukan dengan berusaha menggali informasi yang lebih dalam tentang calon penerima bantuan. Pada tahapan ini dilakukan pendekatan dengan komunitas penerima bantuan dan berusaha untuk menggali informasi yang lebih dalam serta mendengarkan keluhan kesah dari klien dan dapat mengetahui potensi untuk menyelesaikan masalah klien.

Pada tahapan ini saya bersama dengan mitra melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui survei langsung ke lapangan dan mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan peningkatan kualitas rumah dengan melihat kondisi rumah masyarakat. Namun sebelumnya, pemilihan rumah yang akan mendapat bantuan dari program BSPS berdasarkan pada proposal yang telah diajukan ke Balai P2P Sumatera bagian pembangunan rumah swadaya atau BSPS.

2. Tahap Perencanaan Program

Pada tahap perencanaan ini dilakukan strategi pendekatan dengan warga untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi klien.

Pada tahapan ini saya dan mitra melakukan perencanaan atau strategi pendekatan dengan warga. Pendekatan ini dilakukan juga berdasarkan kondisi dan permasalahan warga yang ada. Berdasarkan assesmen atau identifikasi permasalahan dengan komunitas atau masyarakat, maka ditemui bahwa komunitas masyarakat penerima bantuan dan ataupun calon penerima bantuan masih banyak yang belum mengetahui mengenai tahapan atau cara mendapatkan bantuan program BSPS dimulai dari tahapan pembuatan proposal, verifikasi proposal hingga nantinya dinyatakan lolos, kemudian dimulainya pembangunan rumah, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yakni LPD 1 dan LPD 2.

3. Tahap Intervensi

Tahap ini merupakan tahap lanjutan untuk mengimplementasikan strategi pemecahan masalah yang telah direncanakan sebelumnya dan juga berdasarkan permasalahan yang ditemui pada tahap assesmen dengan kelompok perencanaan bantuan.

Pada tahap ini saya dan mitra melaksanakan strategi program yang telah direncanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok penerima bantuan mengenai apa saja yang perlu dilengkapi sebagai syarat menerima bantuan dari program BSPS. Pada tahap intervensi, saya dan mitra melakukan sosialisasi mengenai proses pembuatan proposal dan verifikasi calon penerima bantuan program peningkatan kualitas rumah swadaya. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini, sosialisasi dilakukan atau difokuskan terhadap masyarakat penerima bantuan yang ada di Kabupaten Langkat.

4. Tahap Evaluasi Program

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap komunitas penerima bantuan, apakah mereka sudah dapat memahami dan mengetahui cara dan syarat menerima bantuan program BSPS. Dalam hal ini, saya melalui penugasan dari mitra melakukan pemeriksaan proposal yang ada yang diserahkan oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) kemudian melakukan verifikasi lolos atau tidaknya proposal berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap komunitas penerima bantuan. Pemeriksaan proposal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan pemahaman materi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat mampu berdaya dan membuat proposal serta surat permohonan bantuan secara mandiri, jujur dan sesuai dengan keadaan yang ada. Evaluasi program juga dilakukan bersama dengan Pendamping fasilitator teknik, dalam rangka evaluasi progres pembangunan rumah dari tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

5. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan dengan masyarakat yang tergolong dalam komunitas calon penerima bantuan ketika tenggat kontrak atau program sudah selesai serta berhasil dilakukan antara Superteam BSPS dan mahasiswa/i dengan komunitas calon penerima bantuan/penerima bantuan. Dimana hal ini juga ditandai dengan ditetapkannya masyarakat yang menerima bantuan atau yang telah lolos verifikasi proposal.



Gambar 1. Pelaksanaan Koordinasi Program dengan Perangkat Lurah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan pemberdayaan melalui sosialisasi dan FGD dengan masyarakat komunitas penerima bantuan khususnya di wilayah BP2P BSPS Sumatera II adalah, masyarakat mampu mengetahui mengenai program BSPS yang ditawarkan, mampu memenuhi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan pada proposal, mampu mengetahui tahapan pelaksanaan program, serta mampu secara terbuka dan sukarela memberikan keswadayaan mereka untuk kelancaran pelaksanaan program BSPS. Seperti halnya di daerah Medan Belawan terdapat sekitar 40 penerima bantuan yang kemudian melalui proses verifikasi sehingga dinyatakan lolos mendapat bantuan berupa dana untuk peningkatan kualitas rumah swadaya.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program BSPS yakni :

1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) BSPS

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan perangkat desa, cek kelengkapan syarat rumah layak huni, cek kelengkapan administrasi yang terdiri dari KTP, KK, Surat Tanah dan konfirmasi penghasilan dengan menanyakan pengeluaran bulanan calon penerima bantuan.

2. Pengorganisasian Penerima Bantuan

Adapun pada kegiatan ini dilakukan pembentukan kelompok penerima bantuan dan penyusunan struktur organisasinya. Selain itu pada tahapan ini dilakukan penjelasan mengenai tugas dari perangkat organisasi kelompok, menyusun tugas anggota kelompok dan menyusun rencana kerja.

3. Identifikasi kebutuhan perbaikan rumah penerima bantuan berdasarkan identifikasi kerusakan. Pada tahapan ini diperlukan tenaga dari bidang teknik.

4. Identifikasi keswadayaan.

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan mendata potensi swadaya Penerima Bantuan dengan menanyakan dan memastikan keswadayaan yang dimiliki berupa uang simpanan, simpanan bahan bangunan, tenaga ,tukang yang tidak dibayar melalui bantuan, kemudian mengkonfirmasi potensi swadaya lain seperti bantuan anak, saudara ataupun tetangga.

5. Identifikasi Tukang

Pada tahapan ini dilakukan alternatif ketersediaan tukang dari desa/kelurahan sekitar, dan bersama anggota kelompok memberikan penjelasan kepada tukang tentang upah yang diberikan oleh BSPS dan penjelasan syarat pembangunan rumah sesuai kriteria rumah layak huni.

6. Survey Pemilihan Toko

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan, kendaraan angkut, kelengkapan administrasi bahan bangunan yang dijual legal (terutama kayu).

7. Penyusunan Proposal

Tahapan ini dilakukan oleh PB dan disesuaikan dengan nilai swadaya di Rencana Anggaran Biaya

8. Kontrak Toko/ Penyedia Bahan Bangunan

9. Penyesuaian Daftar Rencana Penggunaan Biaya

10. Penerimaan Bahan Bangunan

11. Pelaksanaan Konstruksi

12. Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan rekap kendala dalam hal pemberdayaan masyarakat, merekap potensi yang ditemui, membuat rekomendasi atas kendala yang dihadapi dan menilai rumah Penerima Bantuan apakah sudah menjadi layak huni atau belum.



Gambar 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan Proposal Permohonan Bantuan

Pada saat pemeriksaan dokumen persyaratan khususnya proposal, tidak jarang ditemui kesalahan dalam hal tidak lengkapnya formulir yang perlu diisi ataupun dilampirkan dalam proposal. Kesalahan tersebut seperti tidak sesuai data pribadi di Kartu Keluarga dengan KTP dan dengan Surat Kepemilikan Tanah. Selain proposal, pada Laporan Penggunaan Dana juga tidak jarang ditemui kesalahan. Kesalahan yang biasa terjadi yakni pada Laporan Penggunaan Dana I. Wajarnya, pada LPD 1, laporan yang diberikan adalah progres penggunaan dan terhadap pembangunan dengan catatan progres mencapai 30-50%. Namun, kesalahan yang umum ditemui adalah banyaknya Laporan Penggunaan Dana I yang dilaporkan sudah mencapai progres pembangunan hingga 80% atau bahkan hampir selesai.

Melihat hal ini, masyarakat tidaklah sepenuhnya disalahkan, ataupun Tenaga Fasilitator Lapangan yang secara langsung mendampingi warga. Namun, diperlukan pemberdayaan yang lebih lagi sehingga masyarakat lebih paham dan mampu menyelesaikan pertanggungjawaban program bantuan yang mereka terima dengan jujur dan mandiri.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai program Pemerintah yang bersifat makro dan mencakup banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya dalam kategori tidak mampu atau erada dalam kemiskinan merupakan program yang tidak bisa berjalan dengan mulus hingga 100%. Program yang berjalan bersifat berkelanjutan sehingga dampak dan hasil yang ditemui juga diharapkan berkelanjutan. Walau tidak bisa berhasil dalam sekali tindakan, namun program BSPS khususnya Sumatera II sudah mampu melaksanakan koordinasi dan memberdayakan masyarakat secara direktif sehingga mampu menjalankan program sesuai dengan visi misi Kementerian PUPR yakni mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan magang sebagai bentuk konversi Praktikum Kerja Lapangan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU di Balai P2P BPS Sumatra II membaw dampak yang sangat baik kepada mahasiswa/i dan tentunya kepada target oemberdayaan yakni masyarakat kelompok penerima bantuan. Perubahan yang dapat dilihat adalah semakin banyaknya masyarakat yang mengenal program BPS dan memahami persyarakat administra program bantuan sehingga kesalahan dalam pembuatan proposal maupun laporan lainnya tidak sefatal ataupun tidak sebanyak proposal pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dampak dari Program BPS juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatra II khususnya melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. Bentuk Keswadayaan masyarakat juga menjadi salah satu bentuk masyarakat ingn berdaya dan memberikan keswadayaan mereka dalam mewujudkan rumah layak huni dan mencapai Indonesia yang sejahtera. Hal ini menjadi suatu luaran yang dapat dicapai melalui metode intervensi yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat kelompok penerima bantuan di Sumatra II.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya selaku mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Ssosial FISIP USU angkatan 2021, mengucapkan terimakasih banyak kepada mitra khususnya mentor program magang kampus merdeka di Balai P2P Sumatra II Program BPS yang telah membimbing dan memberikan arahan mengenai kegiatan yang perlu saya lakukan di lembaga mitra. Saya juga berterimakasih kepada Bapak Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kesos selaku supervisi dan dosen pengampu mata kuliah Praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifir M.R.A, A. F. (2022). Membangun Masyarakat Memberdayakan Literasi Anak dalam Perspektif Sekolah Perjumpaan : Studi di Dusun Bengket Bilong, Desa Karang Bongkot, Labuapi Lombok Barat. *Journal Of Islamic Community Development*, 115-132.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Perumahan dan Permukiman 2022. Badan Pusat Statistik. Jakarta-Indonesia.
- Karisoh, S. D, dkk. 2020. Pengaruh Kekumuhan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Perkampungan Manado. *Jurnal Spasila*. Vol. 7 (1), 62-69.
- Ketentuan Umum SE Nomor 14/SE/Dr/2022. Kementerian PUPR tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
- Utama Ritonga, Fajar , Agus Suriadi (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Studi Pembangunan*. Vol.2 No.2, 87-102.
- Utama Ritonga, Fajar. Agus Suriadi, Dan Mia Aulina Lubis. 2022. Buku Panduan Praktikum Pekerjaan Sosial OBE MBKM
- Rukminto. Adi, Isbandi.2015.Kesejahteraan Sosial. PT.Grafindo Persada, Jakarta
- Sugihartono T., D. A. (2018). Implementasi Sitem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni berbasis We. *Jurnal SISFOKOM*. Vol.7. No.11, 52-52.
- Telaumbanua M.M, M. N. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Upaya Ibu Rumah Tangga dalam Mneingakkan Keseajhteraan Sosial. *Journal PKS Vol. 17 No.3*, 217-226.